



**MENINGKATKAN NASIONALISME
DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH GUNA
PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL**

Oleh :

Prof. Dr. Ir. IWAN NUGROHO, MS

PEMBINA (IV/a) NIP. 1992307

**KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN XLV
LEMHANNAS RI
TAHUN 2010**

RINGKASAN

Bangunan nasionalisme dinyatakan melalui pembangunan untuk memperbaiki kualitas kehidupan, memenangkan prestasi atau keunggulan dalam kompetisi (atau daya saing) antar bangsa, atau memperluas pengaruh politik (Karowics, 1999). Bagi bangsa Indonesia, nasionalisme dapat bersifat ke dalam dan ke luar. Nasionalisme ke dalam, diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa, melaksanakan pembangunan, membebaskan kemiskinan dan keterbelakangan, dan menciptakan kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok nusantara. Nasionalisme keluar, diperlukan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di tengah pergaulan internasional.

Pembangunan dalam satu dasawarsa terakhir menunjukkan tanda-tanda membaik. Strategi pembangunan *pro growth, pro jobs dan pro poor* mampu menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan (*growth with equity*). Pendapatan per kapita masyarakat mencapai USD 2271 pada akhir 2008, naik hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2004, yaitu sebesar USD 1186. Dengan kenaikan ini, Indonesia diundang (bersama Cina, India, Brazil, dan Afrika Selatan) dalam forum G-20, yaitu dua puluh negara yang menguasai 85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

Di tengah kemajuan pembangunan dan prestasi global di atas, nasionalisme ke dalam terus diperjuangkan. Hingga saat ini, kinerja makro ekonomi yang memuaskan belum mampu menutup kelemahan dalam distribusi pembangunan antar wilayah. Wilayah Indonesia Bagian Barat (IBB), yakni Pulau Jawa, Sumatera dan Bali berkontribusi 82.1 persen PDB dengan jumlah penduduk 80.96 persen. Indonesia bagian Timur (IBT) berkontribusi 17.9 persen PDB dan 19.04 persen penduduk. Data pertumbuhan tahun 2005 hingga 2008 juga menunjukkan kesenjangan, IBB 5.34 persen dan IBT 4.30 persen. Propinsi dengan pertumbuhan di bawah rata-rata nasional (data 2008, 5.17 persen) adalah Papua (0.26), Nusa Tenggara Timur (4.76), Nusa Tenggara Barat (3.86), Kalimantan Timur (2.41), Bangka Belitung (3.82), Riau (4.22), Aceh (-5.14) (BPS, 2010b;

2010c). Data di atas menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi wilayah IBT mengalami perlambatan. Hal tersebut mengandung (potensi) kerawanan laten/masalah suku agama, ras, dan antar golongan (SARA), ketidakpuasan, konflik politik dan kepentingan. Keadaan tersebut berlawanan dengan bangunan nasionalisme untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Konsepsi pembangunan wilayah bukan saja membantu penyelesaian permasalahan sosial dan ekonomi atau perbaikan keadaan kesenjangan wilayah, tetapi juga meningkatkan nasionalisme. Nasionalisme akan melahirkan transformasi nilai-nilai lokal (*intellectual raw material*) menjadi sumberdaya pembangunan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan wilayah juga akan meningkatkan daya saing daerah, yang ditandai dengan peningkatan produktivitas industri dan kualitas hidup masyarakat (Bappenas, 2005). Kenaikan daya saing daerah secara agregat akan meningkatkan daya saing nasional (RPJMN 2010-2014; Bappenas, 2004). Hal ini pada gilirannya mengangkat geopolitik nasional dalam pergaulan internasional.

Pembangunan wilayah ditandai oleh tiga tahapan (Drabenstott, 2006). **Pertama**, perkembangan industri dalam suatu wilayah dipicu kegiatan ekspor. Industri berkembang untuk memenuhi permintaan luar wilayah, dipandu oleh teori *export base*. **Kedua**, efisiensi industri. Dalam tahapan ini industri melaksanakan konsolidasi untuk mengefisienkan sistem produksi dan skala ekonomi. Pemerintah memfasilitasi dengan deregulasi agar terbentuk lingkungan bisnis yang kompetitif, sehingga melahirkan pelaku usaha yang tangguh dan mampu bersaing secara global. **Ketiga**, keunggulan wilayah. Tahapan ini ditandai dengan kekuatan internal untuk menghasilkan nilai tambah. Kekuatan internal adalah inovasi yang dilandasi iptek, dan kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurship*). Inovasi diibaratkan bahan bakar, sementara kewirausahaan adalah mesin. Keduanya menjadi sumber kesempatan kerja, pendapatan dan kesejahteraan. Ekonomi wilayah tidak diperankan oleh usaha besar, tetapi oleh usaha-usaha kecil dan menengah yang efisien. Keberhasilan tahapan ini ditentukan oleh kenyamanan iklim bisnis, riset dan SDM yang bermutu.

Lahirnya kemampuan kewirausahaan adalah modal bagi terbentuknya masyarakat madani yang memiliki kompetensi dan daya saing untuk berkompetisi dalam lingkungan global. Di dalam masyarakat madani terbangun kepercayaan (*trust*), dilandasi transparansi, partisipasi, dan tata aturan yang pasti (Effendi, 2005). Peningkatan daya saing bangsa dalam aspek sosial berupa partisipasi dan prestasi bangsa Indonesia di mata masyarakat dunia. Prestasi yang membangkitkan nasionalisme itu antara lain dalam ilmu pengetahuan, budaya, atau olahraga (Kacowicz, 1999). Di dalam masyarakat terjadi proses pembelajaran, kreativitas dan inovasi yang tiada henti. Pemberdayaan kewirausahaan dapat dikenakan kepada SDM baik di dunia usaha (*individual entrepreneur*), masyarakat (*social entrepreneur*), maupun aparat pemda atau manajer organisasi (*intrapreneur*).

Implementasi peningkatan nasionalisme dalam pembangunan wilayah distimulasi oleh kebijakan otonomi daerah (UU 32 tahun 2004) dan program-program pembangunan wilayah yang sedang berjalan. Otonomi memberikan landasan politik kewenangan pembangunan di daerah. Secara konseptual otonomi daerah merupakan landasan bagi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan di daerah. Program-program pembangunan wilayah menyediakan mekanisme penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan, antara lain KAPET, KPBPB, KEK, kawasan perbatasan/tertinggal, Agropolitan, Minapolitan, dll). Karakter penting pembangunan wilayah adalah sistemik dan multi sektor. Pendekatan sistem akan menciptakan *multiplier effects* bagi daerah dalam skala regional, nasional, maupun internasional (RPJMN 2010-2014).

Peningkatan nasionalisme dalam pembangunan wilayah guna pemberdayaan kewirausahaan dalam rangka pembangunan nasional diuraikan melalui peran kepemimpinan, pengembangan kapasitas, partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu lingkungan hidup dan penegakan hukum.

Peningkatan nasionalisme dalam pembangunan wilayah memerlukan **dukungan kualitas kepemimpinan**. Kepemimpinan nasional berfungsi

mengawal manajemen pemerintahan (Sismennas) dan proses reformasi birokrasi, memelihara etika dan moral aparatur serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat madani. Kepemimpinan juga mampu mengharmonisasikan etika bernegara, berorganisasi dan bermasyarakat, sehingga setiap pemimpin mampu berperilaku inklusif mengikuti pola kehidupan masyarakat dalam kegotongroyongan dan kesederhanaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kepemimpinan nasional bangsa Indonesia harus mampu menghadapi dua isu yang juga menjadi tantangan bisnis global, yakni *cross-cultural management* dan *change management*. Lahirnya kepemimpinan yang berkarakter *entrepreneurial and global leadership* akan memudahkan penyelesaian masalah struktural pembangunan wilayah, antara lain lemahnya koordinasi, menurunnya kesenjangan antar wilayah, dan kepentingan sektoral. Kepemimpinan nasional khususnya gubernur mengoptimalkan pembangunan wilayah dan mengkoordinasikan kabupaten kota untuk memanfaatkan potensi wilayah menjadi sumberdaya ekonomi untuk menghasilkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi wilayah.

Peningkatan nasionalisme dalam pembangunan wilayah perlu diiringi dengan **pengembangan kapasitas daerah**. Pengembangan kapasitas daerah yang didukung reformasi birokrasi akan menjalankan peningkatan daya saing daerah melalui peran kelembagaan dan aparatur daerah agar mampu mengantisipasi tuntutan kebutuhan masyarakat dan globalisasi. Di daerah terjadi proses pembelajaran menuju peningkatan kualitas SDM, baik aparatur pemerintah (*intrapreneurship*), dunia usaha (*entrepreneurship*) dan masyarakat (*social entrepreneurship*) sebagai modal manusia (*human capital*) dalam pembangunan nasional. Kapasitas daerah menuntut kompetensi SDM aparatur yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan dilandasi moral dan etika Pancasila. SDM aparatur memiliki penguasaan substansi kebijakan sesuai konteks yang sedang berkembang. SDM pengusaha mampu mengembangkan potensinya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Masyarakat berperan optimal melaksanakan hak dan kewajibannya, maupun sebagai mitra untuk memberikan umpan balik positif dalam

pembangunan. Peningkatan nasionalisme menjadikan daerah lebih dinamis untuk mengembangkan peran masyarakat dan dunia usaha sebagai unsur penting untuk melahirkan *good governance*. Peningkatan kapasitas daerah diiringi dengan penetapan KEK dengan FTZ khususnya di Kalimantan untuk memanfaatkan integrasi ekonomi kawasan regional Laut Cina Selatan dan Selat Malaka.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah mendorong peningkatan nasionalisme dalam pembangunan wilayah. Peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesadaran hukum akan meningkatkan peran masyarakat di dalam pembangunan. Masyarakat dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui proses pembelajaran, masyarakat dapat memberikan umpan balik dan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah. Peningkatan partisipasi masyarakat akan memperbaiki persepsi masyarakat terhadap pembangunan. Persepsi positif terpelihara seiring dengan perolehan nilai tambah dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan dilandasi kepastian dan keadilan hukum. Kerjasama pemerintah, masyarakat dan swasta dapat membangun *trust building* sebagai syarat terbentuknya masyarakat madani dan *good governance*. Peningkatan partisipasi masyarakat diikuti dengan peningkatan kualitas SDM serta wawasan kebangsaan dan bisnis. Masyarakat di daerah harus mampu mentransformasikan nilai-nilai lokal (*intellectual raw material*) ke dalam kehidupan nyata yang modern, rasional, produktif dan bermartabat, menghasilkan nilai tambah dan trampil berpartisipasi dalam *business process* dengan dunia usaha untuk mendukung iklim investasi dan meningkatkan daya saing di daerah.

Peningkatan **pembangunan infrastruktur** di daerah mendorong peningkatan nasionalisme dalam pembangunan wilayah. Pembangunan infrastruktur akan menstimulasi aktivitas perekonomian daerah, membaiknya iklim investasi, meningkatnya efisiensi produksi dan berkembangnya pasar. Investasi infrastruktur mencakup kelistrikan, pelabuhan atau terminal, transportasi, air bersih, dan telekomunikasi; dalam skim pemerintah, swasta murni maupun *public private partnership*. Perlu

dikembangkan mekanisme dan insentif bagi investasi swasta/BUMN dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung program-program pembangunan wilayah (KAPET, KEK, KPBPB, kawasan perbatasan/tertinggal, Agropolitan, Minapolitan, ekowisata), seperti halnya fasilitas FTZ. Partisipasi BUMN di daerah, misalnya PLN, Telkom, Bank pemerintah, TVRI, menunjukkan kehadiran dan peran negara, sekaligus salah satu upaya mengembangkan nasionalisme. Peningkatan investasi infrastruktur diharapkan akan meningkatkan serapan lapangan kerja, aktivitas ekonomi wilayah, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Peningkatan nasionalisme dalam pembangunan wilayah adalah sejalan dengan **peningkatan mutu lingkungan hidup** dan keunggulan wilayah. Wilayah Jawa dapat mengembangkan komoditi utama tanaman pangan, sementara luar Jawa memanfaatkan untuk perkebunan dan kelautan. Komoditi primer dikembangkan lebih lanjut sebagai produk olahan didukung dengan jasa-jasa penunjangnya. Dengan demikian terjadi transformasi struktur ekonomi dari primer menuju sekunder dan tersier diiringi dengan peningkatan nilai tambah ekonomi. Program-program pembangunan wilayah KEK, KPBPB, KAPET, agropolitan, minapolitan maupun ekowisata dapat mendorong pengembangan ekonomi wilayah yang berkelanjutan. Pada posisi ini, peningkatan produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan; serta pengelolaan pertambangan; juga diiringi dengan konservasi lingkungan antara lain: memelihara tata air, konservasi tanah, perlindungan flora fauna dan plasma nutfah, serta manfaat *intangibile*. Gubernur mengkoordinasikan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan lingkungan berlandaskan pada satuan ekosistem yang menghimpun kesatuan aliran informasi, materi dan energi yang menyangga kelestariannya. Pengembangan sektor pariwisata (atau ekowisata) sangat relevan selain menghasilkan nilai tambah ekonomi, juga menghasilkan pembelajaran kewirausahaan, interaksi dengan wisatawan, dan konservasi budaya dan lingkungan. Program-program tersebut di atas diarahkan untuk akselerasi pencapaian MDGs dan mewujudkan ketahanan pangan sebagai amanah UU Pangan. Dengan kata lain, setiap wilayah

menerima intensitas pembangunan sesuai dengan daya dukungnya. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan daya saing daerah.

Peningkatan nasionalisme dalam pembangunan wilayah memerlukan dukungan **penegakan hukum**. Hukum diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan yang harmonis, yang menjamin terwujudnya kepastian dan keadilan hukum bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini menghasilkan ketertiban dan keamanan, serta konservasi lingkungan di daerah. Kepastian meliputi berfungsinya tatanan dan mekanisme kehidupan sesuai dengan yang seharusnya dan mengalir kepada yang berhak secara sah. Keadilan meliputi perlindungan atau pemberian akses kepada hak individu atau masyarakat, sesuai derajat kemampuan. Hal ini menghasilkan partisipasi dan dinamika dalam kehidupan masyarakat, peningkatan wawasan kebangsaan, serta tegaknya kedaulatan NKRI. Kepastian dan keadilan hukum menstimulasi peran serta masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah. Penegakan hukum juga diiringi dengan peningkatan kualitas SDM, dukungan TIK dan alutsista. SDM aparat hukum harus mampu menelaah sistem dan perangkat hukum nasional dikaitkan dengan perubahan lingkungan global, kejahatan lintas negara dan penyelesaian hukum kontrak perdagangan internasional. Alutsista dan dukungan TIK harus mampu mengantisipasi derajat kecanggihan ancaman dan untuk melindungi kedaulatan wilayah NKRI. Perhatian diberikan secara khusus terhadap alutsista dan TIK matra laut dan udara untuk menjaga wilayah nusantara yang memiliki jalur laut dan udara strategis di kawasan Asia dan Pasifik.

Saran kebijakan. Pemerintah perlu menambah KEK dengan fasilitas FTZ di wilayah Kalimantan, yakni di Entikong (kabupaten Sanggau, Kalbar) dan kabupaten Nunukan (Kaltim), untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru atau memperkuat beberapa dari 20 wilayah PKSN. PKSN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi mendukung layanan aktivitas kehidupan ekonomi wilayah-wilayah perbatasan (PP 26 tahun 2008 tentang RTRWN). Upaya ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan sekaligus untuk meningkatkan ketertiban

dan keamanan, serta menjaga kedaulatan NKRI. Sesuai dengan PP 19 tahun 2010 dan PP 7 tahun 2008, Gubernur sesuai fungsinya sebagai wakil pemerintah pusat dan menjalankan tugas pembantuan di daerah memiliki posisi penting untuk mengambil inisiatif mengkoordinasikan pembangunan PKSN dan kerjasama di antara kabupaten/kota di dalam wilayah atau antar propinsi. Upaya ini secara khusus juga dikoordinasikan dengan BNPP (sesuai Pepres 12 tahun 2010) yang diketuai oleh Mendagri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. G. 2005. Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam Kaitan Penyusunan Program Legislasi Di Daerah. Makalah disampaikan dalam Temu Konsultasi Penyusunan Program Legislasi Daerah, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah. Dep. Hukum dan HAM RI Bali, di Hotel Sanur Paradise Plaza, Sanur - Bali, 13-14 September 2005.
- Abdullah, A. G. 2010. Kebijakan dan Strategi Pembinaan Kekuasaan Kehakiman Guna Tegaknya Supremasi Hukum Dalam Rangka Peningkatan Kualitas SDM. Materi ceramah PPRA 45 Lemhannas RI, 27 Juli 2010. Lemhannas RI, Jakarta
- Acs, Z. J. and L. Szerb. 2010. The Global Entrepreneurship And Development Index (GEDI). Paper to be presented at the Summer Conference 2010 On "Opening Up Innovation: Strategy, Organization and Technology" at Imperial College London Business School, June 16 - 18, 2010
- ADB-World Bank. 2005. Improving the Investment Climate in Indonesia. Asian Development Bank, Manila, Philippines. 48p.
- Adi, W. 2010. Keseimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Materi ceramah PPRA 45 Lemhannas RI, 13 Agustus 2010. Lemhannas RI, Jakarta
- Akbar, P. 2010. Pembangunan Hukum dan HAM di Indonesia Dalam Rangka Peningkatan Kualitas SDM. Materi ceramah PPRA 45 Lemhannas RI, 29 Juli 2010. Lemhannas RI, Jakarta
- Amir, S. 2007. Nationalist rhetoric and technological development: The Indonesian aircraft industry in the New Order regime. *Technology in Society* 29 (2007) 283–293
- Asean (Association of Southeast Asian Nations). 2009. Implementing The Roadmap For an Asean Community 2015. Annual Report 2008-2009. Asean Secretary Office, Jakarta
- Asean (Association of Southeast Asian Nations). 2008. One Vision One Identity One Community. Annual Report 2007-2008. Asean Secretary Office, Jakarta
- Bappenas. 2004. Kajian Strategi Pengembangan Kawasan Dalam Rangka Mendukung Akseslerasi Peningkatan Daya Saing Daerah. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Bappenas, Jakarta. 109p.
- Bappenas. 2005. Kajian Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Memaksimalkan Potensi Daya Saing Daerah. Direktorat Kewilayahan II Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bappenas. 2007. Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2007. Bappenas, Jakarta
- Bosworth, S. 2006. Dancing with Giants: The Geopolitics of East Asia in the Twenty-First Century. 41-50. In: Albramowitz, M and S. Bosworth

- (eds.). *Chasing the Sun: Rethinking East Asian Policy*. New York: The Century Foundation Press.
- BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional). 2010. http://www.bphn.go.id/prolegnas/index.php?action=info&info=prolegnas_prior2010 (Diakses 5 Agustus 2010)
- BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Kepulauan Riau. 2010. Berita Ringkas Statistik. Berbagai bulan di tahun 2010. BPS Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. <http://kepri-dev.bps.go.id/in> (13 Agustus 2010)
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2010a. Indeks Pembangunan Manusia, BPS Pusat Jakarta. www.bps.go.id (13 Agustus 2010)
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2010b. Perkembangan Indikator-indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia, Bulan Maret 2010. BPS Pusat Jakarta.
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2010c. Produk Domestik Bruto, BPS Pusat Jakarta. www.bps.go.id (13 Agustus 2010)
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2010d. Statistik Keuangan Daerah. BPS Pusat Jakarta. www.bps.go.id (13 Agustus 2010)
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2010e. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS Pusat Jakarta. www.bps.go.id (13 Agustus 2010)
- Byham, W. C. 2010. Developing the Next Generation of Chinese Business Leaders. *China Business Review*. January-February 2010. Online material.
- CBI (Carnegie Bosch Institute). 2009. Leadership and Change Management in a Multicultural Context. Tepper School of Business, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA
- Cullis, J. and P. Jones. 1992. Public Finance And Public Choice: Analytical perspectives. International Editions. McGraw-Hill, Singapore.
- Drabenstott, M. 2006. Rethinking federal policy for regional economic development. *Economic Review*, first quarter: 115-142
- Effendi, B. 2001. Teologi Baru Politik Islam: Pertautan agama, negara dan demokrasi. Galang Press, Yogyakarta. 294p.
- Effendi, S. 2005. Membangun budaya birokrasi untuk Good governance. Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN. 22 September 2005
- Efird, N. 2010. The State-Owned Enterprise as A Vehicle for Stability. Strategic Studies Institute. ISBN 1-58487-436-8. (April 1020). www.StrategicStudiesInstitute.army.mil/
- e-Government Survey. 2008. From e-Government to Connected Governance . Department of Economic and Social Affairs. United Nations, New York, 2008
- Garnaut, J. 2009. China's sky-high growth does not tell the full story. *Sydney Morning Herald*, 1 Juni 2009
- Grindle, M. S. 2001. In quest of the political: the political economy of development policy making. In: Meier, G and J. E. Stiglitz (eds.).

- Future Development: Economic perspectives. Oxford Univ Press, Oxford. 345-380
- Hasibuan, S. 2003. SDM Indonesia: mengubah kekuatan potensial menjadi kekuatan riil. *Majalah Perencanaan Pembangunan*, Bappenas, Jakarta. Edisi 31, April-Juni 2003: 2-10.
- Hjerppe, R. 2003. Social capital and economic growth. The International Conference on Social Capital, arranged by Economic and Social Research Institute of the Cabinet Office of the Japanese Government, Tokyo, March 24-25, 2003. 26p
- Indriyanto. 2001. Semangat Nasionalisme Dalam Pembangunan Daerah. Makalah disampaikan pada Seminar Regional "Spirit Kebangkitan Nasional di Era Otonomi Daerah" Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, tanggal 23 Mei 2001.
- Juma, C. and V. Timmer. 2003. "Social Learning and Entrepreneurship: A Framework for Analyzing the Equator Initiative and the 2002 Equator Prize Finalists." Working paper of 5 December
- Kacowicz, Arie M. 1999. REGIONALIZATION, GLOBALIZATION, AND NATIONALISM: Convergent, Divergent, or Overlapping? *Journal "Alternatives,"* Vol. 24, No. 4, November 1999, pp. 527-556
- KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). 2010. Program Nasional Minapolitan. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Kluver, R and I. Weber. 2003. Patriotism and the Limits of Globalization: Renegotiating Citizenship in Singapore. *Journal of Communication Inquiry* 27:4 (October 2003): 371-388.
- Kuncoro-Jakti, D. 2010. Penguasaan dan penerapan Iptek di Bidang Politik dan Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas SDM. Materi ceramah PPRA 45 Lemhannas RI, 25 Agustus 2010. Lemhannas RI, Jakarta
- Mair, J. and I. Marty. 2006. Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. *Journal of World Business.* 41: 36-44
- Mangindaan, E. E. 2010. Kebijakan dan Strategi Sumberdaya Manusia Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia. Materi Ceramah PPRA 45 Lemhannas RI, 23 Agustus 2010.
- Mardiasmo. 2010. Revitalisasi Pemerintahan Daerah untuk Pembangunan dan Ketahanan Nasional. Diskusi Perumusan Naskah Akademik untuk Persiapan Seminar PPRA 45. Lemhannas RI, 28 September 2010.
- Maridjan, K. 2010. Revitalisasi Pemerintahan Daerah untuk Pembangunan dan Ketahanan Nasional. Diskusi Perumusan Naskah Akademik untuk Persiapan Seminar PPRA 45. Lemhannas RI, 28 September 2010.
- Martin, R. L. and S. Osberg. 2007. Social entrepreneurship: the case for definition. *Stanford Social Innovation Review.* Spring 2007. 39p
- MLSS-ILO. 2006. Report from the International Forum on High Skill Worker Development in China. Ministry of Labour and Social Security

(People Republic of China) and the International Labour Organization
Beijing, 30-31 October 2006

- Moore, C. 1996. Human resources in the public sector. In: Towers, B (ed.). *The Handbook of Human Resources Management*. Blackwell Business, Massachusetts. 353-372.
- Mubyarto. 2003. Dengan Ekonomi Pancasila Menyiasati Globalisasi. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Edisi - Januari 2003
- Nugroho, I. dan R. Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi, sosial dan lingkungan*. Penerbit Pustaka LP3ES Jakarta. Cetakan Pertama.
- Nugroho, I. P.D. Negara dan Y. A. Nugroho. 2009. Karakteristik Kewirausahaan Penduduk Lokal Pada Jasa Ekowisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *Social Economic of Agriculture and Agribusiness (SOCA) Journal*, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana Denpasar. 9(3): 342-346
- Nugroho, I. 2007. Ekowisata: Sektor Riil Pendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Majalah Perencanaan Pembangunan-BAPPENAS Jakarta*. Edisi 2 th ke XII (Januari-Maret): 44-57.
- Nurwahid, H. 2008. Membangun Masa Depan Bangsa di Atas Pondasi Multikulturalisme. *Jurnal Negarawan*. 9, Agustus 2008
- Palinggi, J. N. 2010. Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perkara Melalui Mediasi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas SDM. Materi ceramah PPRA 45 Lemhannas RI, 24 Agustus 2010. Lemhannas RI, Jakarta
- Poespowardojo, S dan N. J. M. T. Hardjatno. 2010. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka dan Ideologi Nasional. *Pokja Ideologi*. Lemhannas RI, Jakarta
- Pokja Padnas. 2010. Materi Pokok Kewaspadaan Nasional: Integrasi Nasional. Pokja Padnas, Lemhannas RI, Jakarta.
- Pokja Pimnas. 2007. Kepemimpinan Nasional. Pokja Kepemimpinan. Lemhannas RI, Jakarta
- Pokja Sismennas. 2010. Sistem Manajemen Nasional. Pokja Sismennas, Lemhannas RI, Jakarta.
- Pokja Tannas. 2010. Materi Pokok Ketahanan Nasional: Konsepsi dan tolok ukur. Pokja Tannas, Lemhannas RI, Jakarta.
- Pokja Wasantara. 2010. Konsepsi Wawasan Nusantara. Pokja Wasantara. Lemhannas RI, Jakarta
- Porter, M. E. 1998. *Competitive Strategy. Techniques for analysing industries and competitor*. The Free Press, New York. 396p.
- Prasojo, I. B. 2008. Merajut Kembali Indonesia Dalam Rangka Kebangkitan Nasional. *Jurnal Negarawan*. 9, Agustus 2008
- Pratikno. 2010. Revitalisasi Pemerintahan Daerah untuk Pembangunan dan Ketahanan Nasional. Diskusi Perumusan Naskah Akademik untuk Persiapan Seminar PPRA 45. Lemhannas RI, 28 September 2010.

- PURB (Pedoman Umum Reformasi Birokrasi). 2008. Peraturan Menpan No: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
- Rajasa, M. H. 2007. Membangun Karakter dan Kemandirian Bangsa. *Jurnal Negarawan*. 4, Mei 2007.
- Rochwulaningsih, Yety. 2007. Nasionalisme Sebagai Landasan Pengembangan Entrepreneur. Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/3253/2/9_artikel_bu_yety.pdf (Diakses, 21 Agustus 2010)
- Rothberg, D. 1999. Enhanced and Alternative Financing Mechanisms Strengthening National Park Management in Indonesia. NRMP USAID, Jakarta
- RPJMN 2010-2014. 2010. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Peraturan Presiden No 5 tahun 2010. Bappenas, Jakarta
- Sambodo, M. T. 2006. Nasionalisme Ekonomi dalam Era Globalisasi. *Berita Iptek LIPI*. 45(1): 59-67.
- Serageldin, I. 1996. Sustainability and the Wealth of Nations, First steps in an ongoing journey. *Environmentally Sustainable Development (ESD) Studies and Monographs Series No. 5*. World Bank, Washington DC. 21p.
- Silalahi, T. B. 2010. Kepemimpinan Visioner Dalam Rangka Reformasi Birokrasi. Materi Ceramah Kepemimpinan, Lemhannas RI, 7 Juli 2010. Jakarta
- Suhelmi, Ahmad. 2008. Kebangkitan Nasionalisme Indonesia: Suatu Refleksi Sejarah. *CIDES - Center for Information and Development Studies*. Kamis, 22 Mei 2008
- Suryana. 2004. Memahami Karakteristik Kewirausahaan. Direktorat Dikmenjur, Dirjen Dikdasmen. Depdiknas.
- Swasono, Meutia F Hatta. 2004. Membangun Ketahanan Budaya Bangsa Melalui Kesenian. *Majalah Perencanaan Pembangunan*. Bappenas Jakarta. IX(6): 75-77
- UNDP (United Nations Development Programme). 2005. Indonesia's 2005 MDGs Report. United Nations Development Programme. New York
- UNDP (United Nations Development Programme). 2009. Human Development Report 2009. United Nations Development Programme. New York
- Wetik, A. R. 2010. Lahirnya Pancasila. Dalam Modul 1. Sub Bidang Studi Pancasila dan Perkembangannya. Pokja Ideologi. Lemhannas RI, Jakarta
- World Economic Forum. 2010. The Global Competitiveness Report 2010-2011. Geneva, Switzerland.
- Yudhoyono, S. B. 2007. Bangunlah Negara Dengan Perencanaan Yang Baik. *Jurnal Negarawan*. 5, Agustus 2007

Peraturan Perundangan

- UU 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3)
- UU 11 tahun 2005 tentang ratifikasi Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966
- UU 12 tahun 2005 tentang ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966. Indonesia telah meratifikasi ICESCR ke dalam, dan ICCPR ke dalam.
- UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- UU 29 tahun 1998 tentang Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial,
- UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU 33 TAHUN 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU 44 tahun 2007 memperbaharui UU 36 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).
- UU 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- UU 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- UU 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- UU 5 tahun 1998 tentang Konvensi Anti Penyiksaan
- UU 7 tahun 1984 tentang Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan
- UU 7 tahun 1996 tentang Pangan
- UU 37 tahun 2000 tentang KPBPB Sabang
- PP No 19 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
- PP No 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- PP 42 tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil (PNS)
- PP 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
- PP 46 tahun 2007 tentang KPBPB Batam,
- PP 47 tahun 2007 tentang KPBPB Pulau Bintan,
- PP 48 tahun 2007 tentang KPBPB Karimun,

Pepres Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014

Pepres 12 tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Keppres 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak

Keppres 89 tahun 1996, kemudian diperbaharui dengan Keppres 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Hal ini dilengkapi dengan pembentukan KAPET Biak (Keppres 10/1996), (ii) KAPET Batulicin (Keppres 11/1998), (iii) KAPET Sasamba (Keppres 12/1998), (iv) KAPET Sanggau (Keppres 13/1998), (v) KAPET Manado Bitung (Keppres 14/1998), (vi) KAPET Mbay (Keppres 15/1998), (vii) KAPET Parepare (Keppres 164/1998), (viii) KAPET Seram (Keppres 165/1998), (ix) KAPET Bima (Keppres 166/1998), (x) KAPET Batui (Keppres 167/1998), (xi) KAPET Bukari (Keppres 168/1998), (xii) KAPET DAS Kakab (Keppres 170/1998), (xiii) KAPET Sabang (Keppres 171/1998).

Inpres No 5 tahun 2006 tentang Percepatan Wajib Belajar dan Pemberantasan Buta Aksara

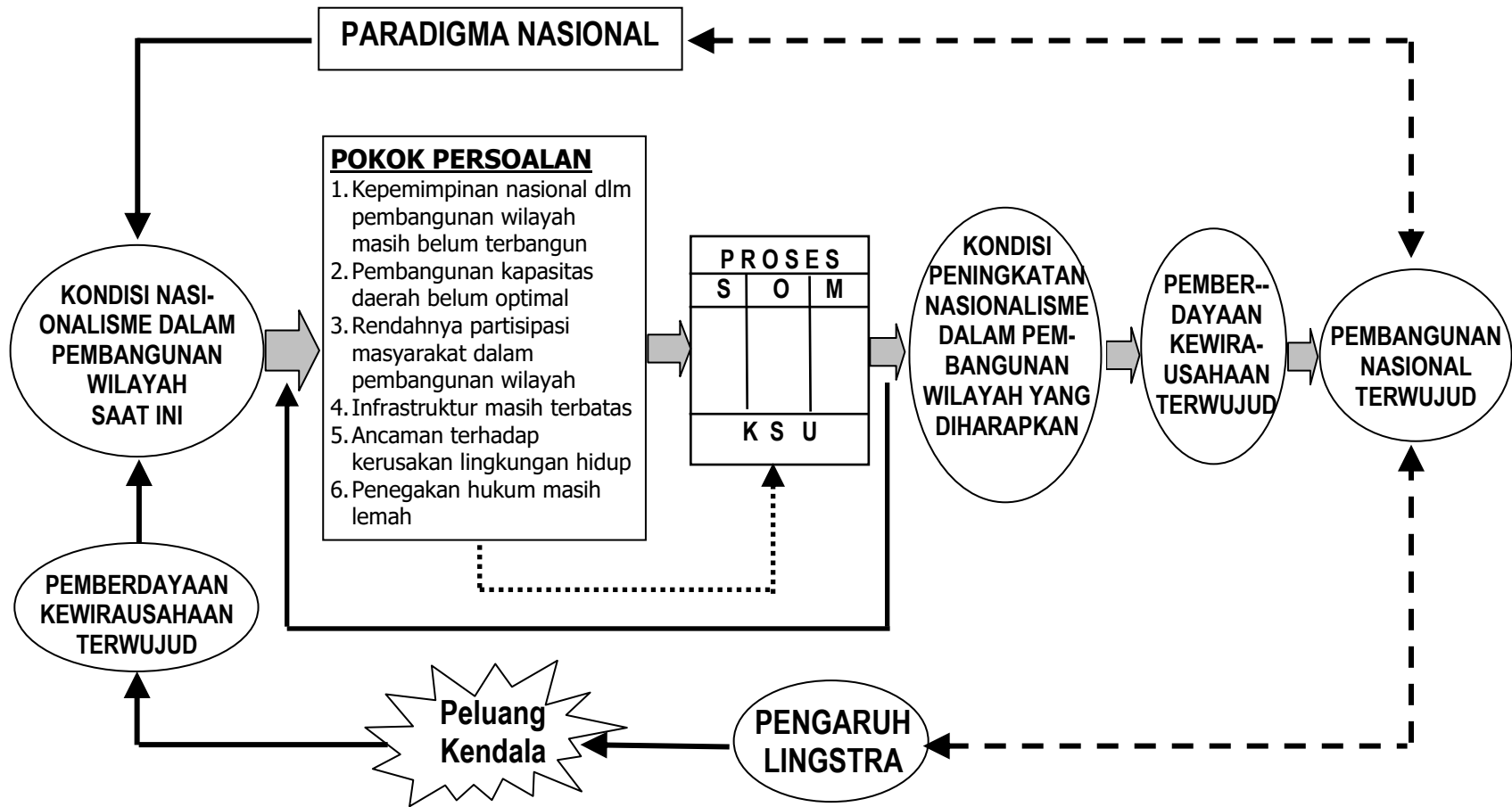
Inpres No 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Keputusan Menteri Negara PDT No. 001/KEP/M-PDT/I/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal

Peraturan Menpan No: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi

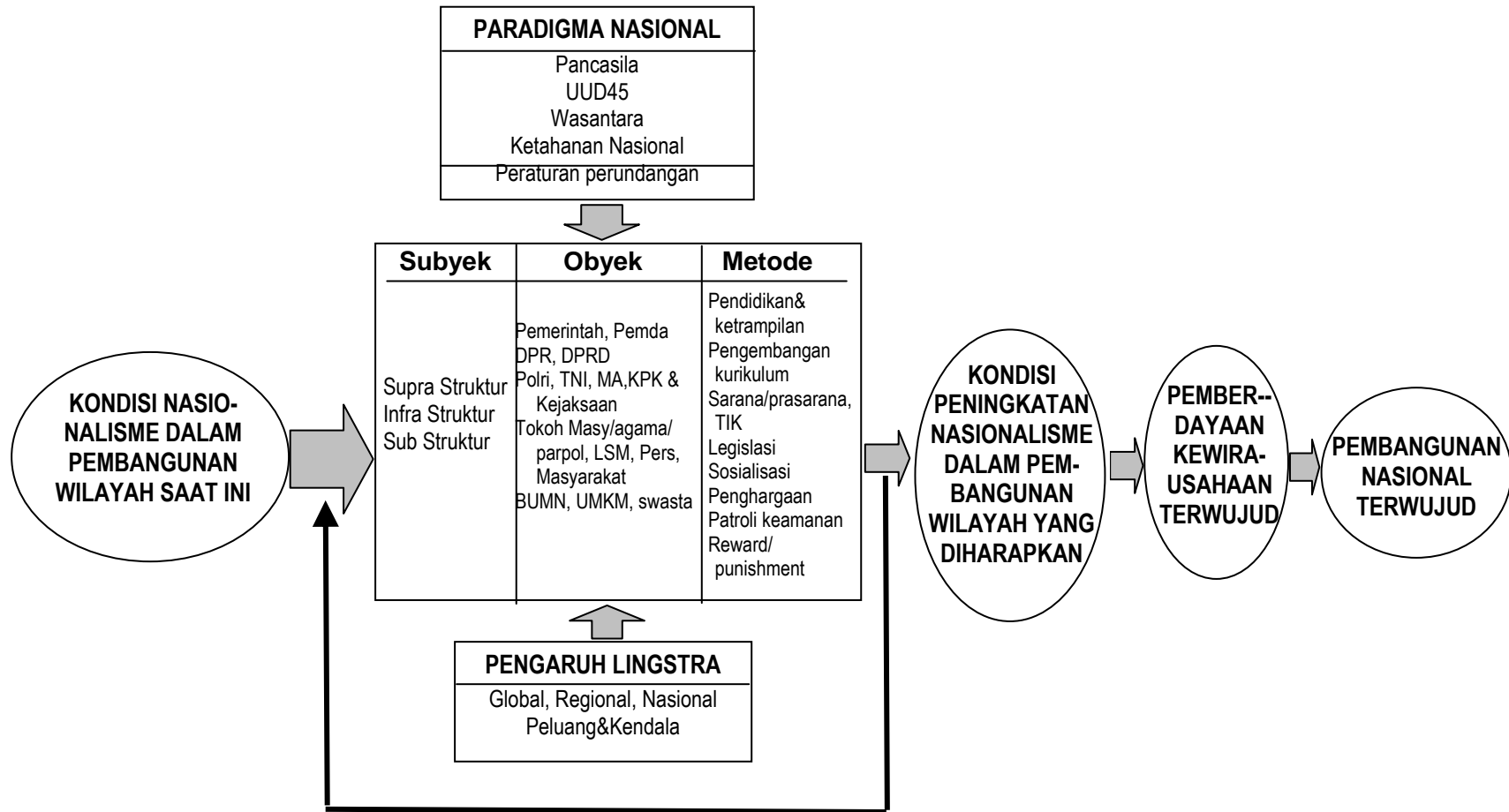
LAMPIRAN

Lampiran 1 MENINGKATKAN NASIONALISME DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH
Alur Pikir GUNA PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN DALAM RANGKA
 PEMBANGUNAN NASIONAL



Lampiran 2
Pola Pikir

**MENINGKATKAN NASIONALISME DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH
GUNA PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN NASIONAL**



Lampiran 3. Beberapa pengertian istilah yang berkaitan dengan pembangunan wilayah, atau yang disebut dalam Taskap

1. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional ^{1) 2)}
2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya ²⁾
3. Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan ²⁾
4. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya ²⁾
5. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan ¹⁾
6. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan ¹⁾
7. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi ¹⁾
8. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis ¹⁾
9. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kegiatan yang menjadi ciri kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian, seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi ¹⁾
10. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi ²⁾
11. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota ²⁾
12. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan ²⁾
13. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara ²⁾
14. Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: (a) tata ruang di wilayah sekitarnya; (b) kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau (c) peningkatan kesejahteraan masyarakat ¹⁾

Sumber Pustaka

1. UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
3. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014

15. Jenis kawasan strategis adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup¹⁾.
 - Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer.
 - Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET), kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB).
 - Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia, seperti Kompleks Candi Borobudur dan Kompleks Candi Prambanan.
 - Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.
 - Yang termasuk kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain adalah kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia seperti Taman Nasional (TN) Lorentz, TN Ujung Kulon, dan TN Komodo.
16. Kawasan tertinggal adalah wilayah yang dikategorikan atau diperhitungkan memiliki indeks kemajuan pembangunan ekonomi dan sumberdaya manusia di bawah rata-rata indeks nasional; sebagai akibat kesenjangan antar wilayah dalam hal kualitas sumber daya manusia, kemampuan perekonomian, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur³⁾.
17. Kawasan perbatasan adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut termasuk pulau-pulau kecil terluar²⁾.
18. Kawasan transmigrasi merupakan kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi (WPT) atau lokasi permukiman transmigrasi (LPT) (UU 29 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian)³⁾
19. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai (UU 36 tahun 2000 tentang pengesahan Perpu No 1 tahun 2000 tentang KPBPB). KPBPB adalah wilayah pengembangan sebagai upaya untuk memperluas dan memodernisasikan perekonomian melalui pengembangan industri manufaktur dan industri logistik sebagai respons terhadap pertumbuhan perdagangan dunia yang cepat dan peningkatan efisiensi pemanfaatan transportasi terutama kepelabuhanan baik laut maupun udara³⁾.

Sumber Pustaka

1. UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
3. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014

20. KAPET adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan; (i) memiliki potensi untuk cepat tumbuh, (ii) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan/atau (iii) memiliki potensi pengembalian investasi yang besar (Keppres No. 150 Tahun 2000 tentang KAPET). Pengembangan KAPET adalah upaya meningkatkan kemampuan suatu wilayah mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan kompetensi sumber daya lokal dan diharapkan berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah yang kesenjangannya masih tinggi ³⁾.
21. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu (UU 39 tahun 2009 tentang KEK), seperti dibebaskan dari kepabeanan, perpajakan, dan didukung infrastruktur. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Pembangunan KEK ini adalah salah satu strategi Indonesia untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya saing internasional, pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja dan penerimaan devisa. Pengembangan KEK di Batam, Bintan dan Karimun akan menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan yang keuntungannya akan dirasakan di pulau-pulau lainnya di Kepulauan Riau maupun wilayah lainnya

Sumber Pustaka

1. UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
3. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014

Lampiran 4. Prioritas Lokasi Penanganan Wilayah Perbatasan dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

Kabupaten/Kota	PKSN	Kabupaten/Kota	PKSN
Prop. Kalbar		20 Kota Jayapura	Jayapura
1 Sambas	Paloh-Aruk	21 Supiori	-
2 Bengkayang	Jagoibabang	Prop. Kepulauan Riau	
3 Sanggau	Entikong	22 Kepulauan Anambas	-
4 Sintang	-	23 Karimun	-
5 Kapuas Hulu	Nanga Badau	24 Kota Batam	Batam
Prop. Kaltim		25 Natuna	Ranai
6 Nunukan	Nunukan	26 Kota Bintan	-
	Simanggaris	Prop. Riau	
	Long Midang	27 Dumai	Dumai
7 Malinau	-	28 Bengkalis	-
8 Kutai Barat	-	29 Rokan Hilir	-
Prop. Sulut		30 Indragiri Hilir	-
9 Kepulauan Talaud	Melonguane	31 Kepulauan Meranti	-
10 Kepulauan Sangihe	Tahuna	Prop. Papua Barat	
Prop. NTT		32 Raja Ampat	-
11 Kupang	-	Prop. Maluku	
12 Timor Tengah Utara	Kefamenanu	33 Maluku Barat Daya	-
13 Belu	Atambua	34 Maluku Tenggara Barat	Saumlaki
14 Alor	-	35 Kepulauan Aru -	
15 Rote Ndao	-	Prop. Maluku Utara	
Prop. Papua		36 Morotai	Daruba
16 Keerom	-	Prop. Sumatera Utara	
17 Merauke	Merauke	37 Serdang Bedagai	-
18 Boven Digoel	Tanah Merah	Prop. NAD	
19 Pegunungan Bintang	-	38 Kota Sabang	Sabang

Sumber: RPJMN 2010-2014

Lampiran 5. 183 Daerah Tertinggal Di Indonesia (RPJMN 2010-2014)

No	Provinsi	Kabupaten	No	Provinsi	Kabupaten
1	N Aceh Darussalam	Simeulue	49	Jawa Timur	Bondowoso
2	N Aceh Darussalam	Aceh Singkil	50	Jawa Timur	Situbondo
3	N Aceh Darussalam	Aceh Selatan	51	Jawa Timur	Bangkalan
4	N Aceh Darussalam	Aceh Timur	52	Jawa Timur	Sampang
5	N Aceh Darussalam	Aceh Barat	53	Jawa Timur	Pamekasan
6	N Aceh Darussalam	Aceh Besar *	54	Banten	Pandeglang
7	N Aceh Darussalam	Aceh Barat Daya	55	Banten	Lebak
8	N Aceh Darussalam	Gayo Lues	56	NusaTenggara Barat	Lombok Barat
9	N Aceh Darussalam	Nagan Raya	57	NusaTenggara Barat	Lombok Tengah
10	N Aceh Darussalam	Aceh Jaya	58	NusaTenggara Barat	Lombok Timur
11	N Aceh Darussalam	Bener Meriah	59	NusaTenggara Barat	Dompu
12	N Aceh Darussalam	Pidie Jaya	60	NusaTenggara Barat	Bima
13	Sumatera Utara	Nias Barat	61	NusaTenggara Barat	Sumbawa Barat
14	Sumatera Utara	Nias Utara	62	NusaTenggara Barat	Lombok Utara
15	Sumatera Utara	Nias	63	NusaTenggara Barat	Sumbawa
16	Sumatera Utara	Tapanuli Tengah	64	Nusa Tenggara Timur	Nagekeo
17	Sumatera Utara	Nias Selatan	65	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah
18	Sumatera Utara	Pakpak Barat	66	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya
19	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	67	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur
20	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	68	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua
21	Sumatera Barat	Solok	69	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat
22	Sumatera Barat	Sawahlunto/Sijunjung	70	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur
23	Sumatera Barat	Padang Pariaman	71	Nusa Tenggara Timur	Kupang *
24	Sumatera Barat	Solok Selatan	72	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan
25	Sumatera Barat	Dharmas Raya	73	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara *
26	Sumatera Barat	Pasaman Barat	74	Nusa Tenggara Timur	Belu *
27	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	75	Nusa Tenggara Timur	Alor *
28	Sumatera Selatan	Lahat	76	Nusa Tenggara Timur	Lembata
29	Sumatera Selatan	Musi Rawas	77	Nusa Tenggara Timur	Flores Timur
30	Sumatera Selatan	Banyu Asin	78	Nusa Tenggara Timur	Sikka
31	Sumatera Selatan	Oku Selatan	79	Nusa Tenggara Timur	Ende
32	Sumatera Selatan	Ogan Ilir	80	Nusa Tenggara Timur	Ngada
33	Sumatera Selatan	Empat Lawang	81	Nusa Tenggara Timur	Manggarai
34	Bengkulu	Kaur	82	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao *
35	Bengkulu	Seluma	83	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat
36	Bengkulu	Mukomuko	84	Kalimantan Barat	Sambas *
37	Bengkulu	Lebong	85	Kalimantan Barat	Bengkayang *
38	Bengkulu	Kepahiang	86	Kalimantan Barat	Landak
39	Bengkulu	Bengkulu Tengah	87	Kalimantan Barat	Sanggau
40	Lampung	Pesawaran	88	Kalimantan Barat	Ketapang
41	Lampung	Lampung Barat	89	Kalimantan Barat	Sintang *
42	Lampung	Lampung Utara	90	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu *
43	Lampung	Way Kanan	91	Kalimantan Barat	Sekadau
44	Bangka Belitung	Bangka Selatan	92	Kalimantan Barat	Melawi
45	Kepulauan Riau	Natuna *	93	Kalimantan Barat	Kayong Utara
46	Kepulauan Riau	Anambas	..		
47	Jawa Barat	Sukabumi	..		
48	Jawa Barat	Garut	94	lanjutan	

Keterangan:

*: Daerah Perbatasan

183 Daerah Tertinggal Di Indonesia (RPJMN 2010-2014) Jumlah ini sudah berkurang dibanding 199 Daerah Tertinggal, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal No 001/KEP/M-PDT/II/2005 Tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal

Lampiran 5. Daerah Tertinggal Di Indonesia (lanjutan)

No	Provinsi	Kabupaten	No	Provinsi	Kabupaten
94	Kalimantan Tengah	Seruyan	142	Maluku Utara	Halmahera Barat
95	Kalimantan Selatan	Barito Kuala	143	Maluku Utara	Halmahera Tengah
96	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	144	Maluku Utara	Kepulauan Sula
97	Kalimantan Timur	Kutai Barat *	145	Maluku Utara	Halmahera Selatan
98	Kalimantan Timur	Malinau *	146	Maluku Utara	Halmahera Utara *
99	Kalimantan Timur	Nunukan *	147	Maluku Utara	Halmahera Timur
100	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe *	148	Maluku Utara	Morotai
101	Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud *	149	Papua Barat	Kaimana
102	Sulawesi Utara	Kepulauan Sitaro	150	Papua Barat	Teluk Wondama
103	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	151	Papua Barat	Teluk Bintuni
104	Sulawesi Tengah	Banggai	152	Papua Barat	Sorong Selatan
105	Sulawesi Tengah	Morowali	153	Papua Barat	Sorong
106	Sulawesi Tengah	Poso	154	Papua Barat	Raja Ampat *
107	Sulawesi Tengah	Donggala	155	Papua Barat	Tambrau
108	Sulawesi Tengah	Toli Toli	156	Papua Barat	Maybrat
109	Sulawesi Tengah	Buol	157	Papua	Merauke *
110	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	158	Papua	Jayawijaya *
111	Sulawesi Tengah	Tojo Una Una	159	Papua	Nabire
112	Sulawesi Tengah	Sigi	161	Papua	Biak Numfor
113	Sulawesi Selatan	Selayar	162	Papua	Paniai
114	Sulawesi Selatan	Jeneponto	163	Papua	Puncak Jaya
115	Sulawesi Selatan	Pangkajene Kepulauan	164	Papua	Mimika
116	Sulawesi Selatan	Toraja Utara	165	Papua	Boven Digoel *
117	Sulawesi Tenggara	Buton	166	Papua	Mappi
118	Sulawesi Tenggara	Muna	167	Papua	Asmat
119	Sulawesi Tenggara	Konawe	168	Papua	Yahukimo
120	Sulawesi Tenggara	Konawe Selatan	169	Papua	Pegunungan Bintang *
121	Sulawesi Tenggara	Bombana	170	Papua	Tolikara
122	Sulawesi Tenggara	Wakatobi	171	Papua	Sarmi
123	Sulawesi Tenggara	Kolaka Utara	172	Papua	Keerom *
124	Sulawesi Tenggara	Konawe Utara	173	Papua	Waropen
125	Sulawesi Tenggara	Buton Utara	174	Papua	Supiori *
126	Gorontalo	Gorontalo Utara	175	Papua	Mamberamo Raya
127	Gorontalo	Boalemo	176	Papua	Lanny Jaya
128	Gorontalo	Pohuwato	177	Papua	Mamberamo
129	Sulawesi Barat	Majene	178	Papua	Nduga
130	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	179	Papua	Yalimo
131	Sulawesi Barat	Mamasa	180	Papua	Puncak
132	Sulawesi Barat	Mamuju	181	Papua	Dogiyai
133	Sulawesi Barat	Mamuju Utara	182	Papua	Deiyai
134	Maluku	Maluku Tenggara Barat *	183	Papua	Intan Jaya
135	Maluku	Maluku Tengah			
136	Maluku	Buru			
137	Maluku	Kepulauan Aru			
138	Maluku	Seram Bagian Barat			
139	Maluku	Seram Bagian Timur			
140	Maluku	Maluku Barat Daya			
141	Maluku	Buru Selatan			

Keterangan:

* : Daerah Perbatasan

Jumlah ini sudah berkurang dibanding 199 Daerah Tertinggal, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal No 001/KEP/M-PDT/I/2005 Tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal

Lampiran 6. Wilayah Agropolitan di Indonesia

No	Propinsi	Kota/Kab Agropolitan	Komoditi/Basis Agribisnis
1	Sumatera Barat	Agam	Sapi
2	Bengkulu	Rejang Lebong	jagung, sayuran
3	Jawa Barat	Cianjur	Sayuran, Bunga-bunga
4	DI Yogyakarta	Kulon Progo	Biofarmaka
5	Bali	Bangli	Kopi, Jeruk
6	Sulawesi Selatan	Barru	Sapi
7	Gorontalo	Boalemo	Jagung
8	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Coklat, jagung
9	NAD Aceh	Aceh Besar	Sapi
10	Sumatera Utara	Tapanuli Utara, Simalungun, Toba Samosir, Dairi, dan Karo	Sayuran
11	Lampung	Lampung Tengah	Padi, jagung, kedele
12	Babel	Belitung	Manggis, lada
13	Riau	Indragiri Hilir	Kelapa, padi
14	Jambi	Tanjung Jabung Timur	Kedele, sapi potong
15	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir (OKI), Ulu (OKU)	Padi, hortikultura
16	Banten	Pabdeglang	Palawija, durian
17	Jawa Barat	Kuningan	Sapi
18	Jawa Tengah	Semarang, Pemalang	Tanaman hias, farmaka, sapi
19	Jawa Timur	Mojokerto, Banyuwangi	Palawija
20	Bali	Tabanan	Peternakan
21	Nusa Tenggara Barat	Dompu	Sapi
22	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Sapi
23	Sulawesi Utara	Minahasa	Kentang, wortel, sayuran
24	Sulawesi Tengah	Donggala	kakao, sapi, ikan
25	Sulawesi Tenggara	Kendari	sapi
26	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah	Jeruk, sayuran
27	Kalimantan Tengah	Kapuas	Sapi
28	Kalimantan Barat	Pontianak	Lidah buaya, pepaya, sayuran
29	Papua	Jayapura	Kakao

Nomer 1 hingga 8 ditetapkan tahun 2002, Nomer 9 hingga 29 ditetapkan tahun 2003

Sumber: www.deptan.go.id

Lampiran 7. Minapolitan di Indonesia

No	Propinsi dan kabupaten/Kota	No	Propinsi dan kabupaten/Kota	No	Propinsi dan kabupaten/Kota
	Provinsi NAD		Provinsi Lampung		Provinsi Kalimantan Barat
1	Aceh Selatan	50	Lampung Tengah	100	Sambas
2	Aceh Tamiang	51	Lampung Selatan	101	Kapas Hulu
3	Aceh Utara	52	Tulang Bawang	102	Bengkayang
4	Aceh Tenggara	53	Tanggamus	103	Kayong Utara
5	Aceh Timur	54	Pesawaran	104	Kota Pontianak
6	Aceh Barat Daya	55	Lampung timur	105	Ketapang
	Provinsi Sumatera Utara	56	Kota Bandar Lampung		Provinsi Kalimantan Tengah
7	Serdang Berdagai		Provinsi DKI Jakarta	106	Pulang Pisau
8	Tapanuli Utara	57	Kota Jakarta Utara	107	Katingan
9	Samosir		Provinsi Banten	108	Palangka Raya
10	Deli Serdang	58	Serang	109	Barito Selatan
11	Simalungun	59	Tangerang	110	Kotawaringin Barat
12	Tapanuli Tengah	60	Lebak		Provinsi Kalimantan Selatan
13	Langkat	61	Pandeglang	111	Banjar
14	Kota Medan	62	Kota Serang	112	Hulu Sungai Utara
	Provinsi Sumatera Barat		Provinsi Jawa Barat	113	Tabalong
15	Darmasraya	63	Karawang	114	Kotabaru
16	Pesisir Selatan	64	Bogor	115	Tanah Laut
17	Agam	65	Garut	116	Tanah Bumbu
18	Kota Padang	66	Cirebon		Provinsi Kalimantan Timur
	Provinsi Riau	67	Kota Cirebon	117	Malinau
19	Kuantan Sengigi	68	Sumedang	118	Nunukan
20	Indragiri Hilir	69	Indramayu	119	Penajam Paser Utara
21	Kota Dumai	70	Subang	120	Kutai Kertanegara
22	Kampar	71	Bekasi	121	Bulungan
23	Rokan Hulu	72	Sukabumi	122	Kutai Timur
24	Bengkalis	73	Tasikmalaya	123	Kota Balikpapan
	Provinsi Kepri		Provinsi Jawa Tengah		Provinsi Sulawesi Utara
25	Bintan	74	Banyumas	124	Minahasa Selatan
26	Kota Batam	75	Boyolali	125	Bolaang Mongondow Utara
27	Tanjung Balai Karimun	76	Tegal	126	Sangihe
	Provinsi Jambi	77	Demak	127	Minahasa Utara
28	Batanghari	78	Pati	128	Minahasa
29	Muaro Jambi	79	Cilacap	129	Kota Bitung
30	Kota Jambi	80	Purbalingga	130	Kota Manado
31	Tanjung Jabung Barat	81	Magelang		Provinsi Gorontalo
	Provinsi Bengkulu	82	Brebes	131	Gorontalo Utara
32	Kaur	83	Kota Tegal	132	Boalemo
33	Bengkulu Utara	84	Rembang	133	Pahuwato
34	Saluma	85	Kota Pekalongan		Provinsi Sulawesi Tengah
35	Kota Bengkulu		Provinsi DIY	134	Sigi
	Provinsi Sumatera Selatan	86	Gunung Kidul	135	Bangai Kepulauan
36	Ogan Ilir	87	Sleman	136	Tojo Una-una
37	Ogan Komering Ilir	88	Kulonprogo	137	Banggai
38	Ogan Komering Ulu Timur		Provinsi JAWA TIMUR	138	Parigi Moutong
39	Ogan Komering Ulu	89	Tuban	139	Donggala
40	Musi Banyuasin	90	Blitar		Provinsi Sulawesi Selatan
41	Ogan Komering Ulu Selatan	91	Trenggalek	140	Bone
42	Banyuasin	92	Lamongan	141	Jeneponto
43	Palembang	93	Sumenep	142	Gowa
44	Musi Rawas	94	Gresik	143	Luwu Timur
	Provinsi Bangka Belitung	95	Sidoarjo	144	Sinjai
45	Bangka Selatan	96	Malang	145	Takalar
46	Belitung Timur	97	Banyuwangi	146	Wajo
47	Belitung	98	Kota Probolinggo	147	Maros
48	Bangka Tengah	99	Pacitan	148	Bantaeng
49	Bangka			149	Pangkep
				150	Kota Makassar

Lampiran 7 (lanjutan)

No	Propinsi dan kabupaten/Kota	No	Propinsi dan kabupaten/Kota	No	Propinsi dan kabupaten/Kota
	Provinsi Sulawesi Barat		Provinsi NTB		Provinsi Maluku Utara
151	Majene	168	Lombok Timur	186	Halmahera Selatan
152	Mamuju	169	Bima	187	Sula
153	Mamuju Utara	170	Lombok Barat	188	Marotai
154	Polewali Mandar	171	Sumbawa	189	Kota Temate
	Provinsi Sulawesi Tenggara	172	Lombok Tengah		Provinsi Papua
155	Kolaka	173	Sumbawa Barat	190	Waropen
156	Konawe Selatan		Provinsi NTT	191	Merauke
157	Kolaka Utara	174	Sumba Timur	192	Biak Numfor
158	Buton	175	Sikka	193	Kota Jayapura
159	Konawe Utara	176	Lembata		Provinsi Papua Barat
160	Muna	177	Rote Ndao	194	Raja Ampat
161	Kota Kendari	178	Alor	195	Sorong
162	Kota Bau-Bau	179	Kota Kupang	196	Kaimana
	Provinsi Bali		Provinsi Maluku	197	Kota Sorong
163	Klungkung	180	Kep. Aru		
164	Buleleng	181	Seram Bagian Barat		
165	Badung	182	Maluku Barat Daya		
166	Jembrana	183	Maluku Tenggara		
167	Kota Denpasar	184	Maluku Tengah		
		185	Kota Ambon		

Sumber: KKP (2010)

Lampiran 8. Taman Nasional di Indonesia

No Taman Nasional	Luas	Lokasi, propinsi	Ekosistem	Keputusan Menhut	
	ha				
1	Bukit Barisan Selatan	365.000	Bengkulu, Lampung	Hutan Tropika ⁵⁾	Mentan No. 736/Mentan/X/1982
2	Gunung Palung	90.000	Kalbar	Hutan Tropika, Rawa ⁵⁾	448/Kpts-VI/1990
3	Rawa Aopa Watumohai	105.194	Sultra	Rawa, Hutan Tropika ⁵⁾	756/Kpts-II/1990
4	Bunaken	89.065	Sulut	Laut, pesisir ⁵⁾	730/Kpts-II/1991
5	Bukit Baka-Bukit Raya	181.090	Kalbar, Kalteng	Hutan Tropika ⁵⁾	281/Kpts-II/1992
6	Ujung Kulon	122.956	Banten	Hutan tropika, Pesisir, laut ⁵⁾	284/Kpts-II/1992
7	Berbak	162.700	Jambi	Rawa gambut, air tawar ⁵⁾	285/Kpts-II/1992
8	Bogani Nani Wartabone	287.115	Sulut, Gorontalo	Hutan Tropika ⁵⁾	731/Kpts-II/1992
9	Alas Purwo	43.420	Jatim	Hutan Tropika ^{t)}	190/Kpts-II/1993
10	Siberut	190.500	Sumbar	Hutan Tropika ⁵⁾	407/Kpts-II/1993
11	Kutai	198.629	Kaltim	Rawa, Hutan Tropika ^{t)}	325/Kpts-II/1995
12	Betung Kerihun	800.000	Kalbar	Hutan Tropika ⁵⁾	467/Kpts-II/1995
13	Bali Barat	19.002	Bali	Hutan Tropika, Pesisir, laut ^{t)}	493/Kpts-II/1995
14	Kayan Mentarang	1.360.500	Kaltim	Hutan Tropika ⁵⁾	631/Kpts-II/1996
15	Tanjung Puting	415.040	Kalteng	Rawa, Hutan Tropika ^{t)}	687/Kpts-II/1996
16	Lorentz	2.450.000	Papua	Rawa, Hutan Tropika ⁵⁾	154/Kpts-II/1997
17	Gunung Leuser	1.094.692	N Aceh Drslm	Hutan Tropika ^{t)}	276/Kpts-VI/1997
18	Meru Betiri	58.000	Jatim	Rawa, Hutan Tropika ^{t)}	277/Kpts-VI/1997
19	Bromo Tengger Semeru	50.276	Jatim	Hutan Tropika ⁵⁾	278/Kpts-VI/1997
20	Baluran	25.000	Jatim	Savana, pantai, Hutan Tropika ^{t)}	279/Kpts-VI/1997
21	Gunung Rinjani	40.000	NTB	Hutan Tropika ⁵⁾	280/Kpts-VI/1997
22	Manusela	189.000	Maluku	Hutan Tropika ⁵⁾	281/Kpts-IV/1997
23	Wasur	413.810	Papua	Savana, rawa ⁵⁾	282/Kpts-VI/1997
24	Kelimutu	5.000	NTT	Hutan Tropika ⁵⁾	675/Kpts-II/1997
25	Laiwangi-Wanggameti	47.014	NTT	Hutan Tropika ⁵⁾	576/Kpts-II/1998
26	Manupeu-Tanah Daru	87.984	NTT	Hutan Tropika ⁵⁾	576/Kpts-II/1998
27	Danau Sentarum	132.000	Kalbar	Rawa, danau ⁵⁾	34/Kpts-II/1999
28	Lore Lindu	217.991	Sulteng	Hutan Tropika ⁵⁾	646/Kpts-II/1999
29	Way Kambas	125.621	Lampung	Rawa, Hutan Tropika ⁵⁾	670/Kpts-II/1999
30	Kerinci Seblat	1.375.349	Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel	Hutan Tropika ⁵⁾	901/Kpts-II/1999
31	Komodo	173.300	NTT	Savana, pesisir ⁵⁾	172/Kpts-II/2000
32	Bukit Dua Belas	60.500	Jambi	Hutan Tropika ⁵⁾	258/Kpts-II/2000
33	Kep Karimunjawa	110.117	Jateng	Laut, Pesisir ^{t)}	74/Kpts-II/2001
34	Taka Bonerate	530.765	Sulsel	Laut, Pesisir ⁵⁾	92/Kpts-II/2001
35	Kep Wakatobi	1.390.000	Sultra	Laut, Pesisir ⁵⁾	765/Kpts-II/2002
36	Kep Seribu	108.000	Jakarta	Laut, Pesisir ^{t)}	6310/Kpts-II/2002
37	Bukit Tiga Puluh	127.698	Riau, Jambi	Hutan Tropika ⁵⁾	6407/Kpts-II/2002
38	Tel Cenderawasih	1.453.500	Papua	Hutan propika, Laut, Pesisir ⁵⁾	8008/Kpts-II/2002
39	Sembilang	205.078	Sumsel	Rawa gambut, air tawar ⁵⁾	95/Kpts-II/2003
40	Gunung Gede Pangrango	15.000	Jabar	Hutan Tropika ^{t)}	174/Kpts-II/2003
41	Gunung Halimun	40.000	Jabar, Banten	Hutan Tropika ^{t)}	175/Kpts-II/2003
42	Aketajawe-Lolobata	167.300	Halmahera, Maluku Utara	Hutan Tropika	397/Menhut-II/2004
43	Bantimurung - Bulusaraung	43.750	Sulsel	Hutan Tropika	398/ Menhut-II/2004
44	Batang Gadis	108.000	Sumut	Hutan Tropika	126/ Menhut-II/2004
45	Gunung Ciremai	15.500	Jabar	Hutan Tropika	424/ Menhut-II/2004
46	Gunung Merbabu	5.725	Jateng	Hutan Tropika	135/ Menhut-II/2004
47	Gunung Merapi	6.410	Jateng	Hutan Tropika	134/ Menhut-II/2004
48	Togean	362.605	Sulteng	Hutan Tropika, Laut, Pesisir	418/ Menhut-II/2004
49	Sebangau	568.700	Kalteng	Rawa Gambut	423/Menhut-II/2004
50	Tesso Nilo	38.576	Riau	Hutan Tropika	255/Menhut-II/2004

⁵⁾ ancaman sedang^{t)} ancaman tinggiSumber: http://www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/tn_index.htm dan USAID Indonesia (2004)

Lampiran 9. Tujuan dan Target MDG Indonesia 1990 – 2015

Tujuan	T a r g e t
1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan	1. Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah \$ 1 per hari menjadi setengahnya antara 1990 – 2015
	2. Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun 1990 – 2015
2. Mencapai pendidikan dasar untuk Semua	3. Menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar (<i>primary schooling</i>)
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	4. Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.
4. Menurunkan angka kematian anak	5. Menurunkan Angka Kematian Balita sebesar dua-pertiganya, antara tahun 1990 dan 2015
5. Meningkatkan kesehatan ibu	6. Menurunkan angka kematian ibu antara tahun 1990 dan 2015 sebesar tiga-perempatnya
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya	7. Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015
	8. Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup	9. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang
	10. Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015
	11. Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020
8. Membangun kemitraan global utk pembangunan	12. Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif
	13. Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang
	14. Bekerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menciptakan lapangan kerja yang baik dan produktif bagi penduduk usia muda
	15. Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi

Sumber: Bappenas (2007)

Lampiran 10. Saran Pengembangan Wilayah Nunukan dan Sanggau

